



**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR 27 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN  
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri . . .

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sebagai Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Tim Pengarah

Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

2. Tim Pelaksana

a. Ketua:

- 1) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas baik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional maupun dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Nasional;
- 3) Melakukan koordinasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas baik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional maupun dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Nasional; dan

4). Melakukan...

- 4) Melakukan supervisi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas kepada masing-masing Ketua Kelompok Program.
- b. Wakil Ketua I/Koordinator I:  
Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok A. Program Manajemen Perubahan; Kelompok C. Program Penataan dan Penguatan Organisasi; Kelompok D. Program Penataan Tata Laksana; dan Kelompok F. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
  - c. Wakil Ketua II/Koordinator II:  
Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok B. Program Deregulasi Kebijakan; Kelompok E. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
  - d. Wakil Ketua III/Koordinator III:  
Membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua pada Kelompok G. Program Penguatan Pengawasan; Kelompok H. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
  - e. Sekretaris:  
Mendukung kelancaran tugas Ketua dalam hal administrasi, dokumentasi, dan kesekretariatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
  - f. Ketua Kelompok Program:
    - 1) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas sesuai kelompok yang terdiri atas:
      - A. Program manajemen perubahan;
      - B. Program deregulasi kebijakan;
      - C. Program penataan dan penguatan organisasi;
      - D. Program penataan tata laksana;
      - E. Program penataan sistem manajemen SDM aparatur;
      - F. Program penguatan akuntabilitas kinerja;
      - G. Program penguatan pengawasan; dan
      - H. Program peningkatan kualitas pelayanan publik.
    - 2) Melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua/Koordinator dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas masing-masing unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
  - g. Anggota:
    - 1) Melakukan pengumpulan data, penyiapan bahan dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas; dan

- 2) Menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas untuk disampaikan secara berkala kepada ketua kelompok program terkait.

- KETIGA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat mengikutsertakan dan bekerjasama dengan para pakar/tenaga ahli sebagai narasumber.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal 25 April 2022



DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
SEKRETARIS JENDERAL,

HARJO SUSMORO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN  
NASIONAL  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI  
BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Laksda TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr (Han)	Deputi Pengkajian dan Penginderaan	Sekretaris
3.	Marsda TNI Maman Suherman, M.A.P., M.Han.	Deputi Pengembangan	Anggota
4.		Deputi Sistem Nasional	Anggota
6.		Deputi Politik dan Strategi	Anggota

DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
SEKRETARIS JENDERAL,  
  
HARJO SUSMORO



**TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS  
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Laksda TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr (Han)	Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan	Ketua
2.	Marsma TNI Shopian	Kepala Biro POK	Wakil Ketua I / Koordinator I (Pok A, C, D dan F)
3.	Laksma TNI Supendi, S.T.,M.Tr.Opsla	Kepala Biro Umum	Wakil Ketua II / Koordinator II (Pok B dan E)
4.	Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I.	Kepala Biro PSP	Wakil Ketua III / Koordinator III (Pok G dan H)
5.	Ir. Hadian Ananta Wardhana, CES	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial, Desisnas	Sekretaris
6.	Tri Hariyadi, S.Sos, M.AP	Koordinator Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	Ketua Pok A (Program Manajemen Perubahan)
7.	Jumadi Saman	Sub Koordinator Kelompok Organisasi dan Fasilitasi RB Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	Anggota
8.	Tisa Siti Rachmawati, SE.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana Sub Kelompok Tata Laksana Kelompok Ortala Biro POK	Anggota
9.	Sofyanti Astri, S.E.	Penata Keuangan Sub Kelompok Perbendaharaan Kelompok Keuangan Biro POK	Anggota
10.	Sely Kurniawati, S.E.	Analisis Sistem Informasi Perbendaharaan Sub Kelompok Perbendaharaan Kelompok Keuangan Biro POK	Anggota

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
11.	Dr. La Piliha, S.Pd., M.Pd.	Arsiparis Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok TU Desisnas selaku Plt. Koordinator Kelompok Tata Usaha dan Protokol Biro Umum	Ketua Pok B (Program Deregulasi Kebijakan)
12.	Deviana Oktorina, S.Sos.	Sub Koordinator Kelompok Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota
13.	Andreanus, S.H.	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum Sub Kelompok Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota
14.	Amalia Fajarina, S.H.	Analisis Hukum Sub Kelompok Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota
15.	Karina Dewi, S.H.	Analisis Hukum Sub Kelompok Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota
16.	Nurman Kahar, S.IP., M.AP.	Kabag Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa, Biro Umum	Ketua Pok C (Program Penataan dan Penguatan Organisasi)
17.	Agus Munadi, SAP	Analisis Kebijakan BMN Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum	Anggota
18.	Nasrul Ma'arif, S.Sos.	Analisis Kelembagaan Sub Kelompok Organisasi dan Fasilitasi RB Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK	Anggota
19.	Helfrida Sinaga, SE.	Auditor Ahli Pertama Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP	Anggota
20.	Raka Narhadi Saputra, S.E.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Sub Kelompok Rencana Program dan Kinerja Bagian Perencanaan Biro POK	Anggota
21.	Yadi Kurniawanto, S.T.	Koordinator Kelompok Keuangan Biro POK	Ketua Pok D (Program Penataan Tata Laksana)

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
22.	Enang Suhendar, S.Kom.	Analisis Manajemen Perkantoran Sub Kelompok Tata Laksana Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK	Anggota
23.	Maulidya Nurisya, S.E.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Sub Kelompok Tata Laksana	Anggota
24.	Yesilia Prahasasti, S.E.	Penyuluh Kearsipan Sub Kelompok Kearsipan Kelompok TU dan Protokol Biro Umum	Anggota
25.	Nadia Talita Putri, S.I.P.	Analisis Persandian Sub Kelompok Protokol dan Pengamanan Kelompok TU dan Protokol Biro Umum	Anggota
26.	Imam Supriyadi, S.E.	Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Ketua Pok E (Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur)
27.	Reno Ardiansyah, S.Kom.	Sub Koordinator Kelompok Disiplin dan Pengembangan Pegawai Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota
28.	Agus Suprpto, S.Sos.	Sub Koordinator Kelompok Mutasi Peg dan Adm Kepeg Kelompok Kepeg dan Hukum Biro Umum	Anggota
29.	Renie Dwi Sulistyani, S.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Sub Kelompok Mutasi Pegawai dan Adm Kepeg Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota
30.	Haryo Sasmito, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Sub Kelompok Mutasi Pegawai dan Adm Kepeg Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Anggota
31.	Kolonel Laut (S) Abdul Rozaq, S.T., M.Tr.Hanla., M.M.	Kabag Perencanaan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	Ketua Pok F (Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja)

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
32.	Prasetyo, A.Md.	Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Kelompok Perencanaan Biro POK	Anggota
33.	Genanto Atmadiredja, S.E.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Subbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Perencanaan Biro POK	Anggota
34.	Bayu Prawiradisma Siregar, S.E.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Sub Kelompok Rencana Program dan Kinerja Kelompok Perencanaan Biro POK	Anggota
35.	Afifah Fitriani, S.E.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Sub Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Bagian Perencanaan Biro POK	Anggota
36.	Titin Mardyaningsih, S.E., M.M.	Koordinator Kelompok Pengawasan Internal Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal	Ketua Pok G (Program Penguatan Pengawasan)
37.	Daniel Maruli Tua Manik, S.E.	Auditor Ahli Pertama Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP	Anggota
38.	Alvin Rayinda Pramasha, S.E.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan Sub Kelompok Tata Usaha Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP	Anggota
39.	Riedjanti Restu Biandari, S.E.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan Sub Kelompok Tata Usaha Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP	Anggota
40.	Dian Ayu Pertiwi, S.E.	Auditor Ahli Pertama Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP	Anggota
41.	Kolonel Laut (E) Ari Purnomo, S.T., M.Si	Kabag Sistem Informasi Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal	Ketua Pok H (Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)
42.	Dedy Purwadi, A.Md.	Sub Koordinator Kelompok Teknologi Informasi Kelompok Sisfo Biro PSP	Anggota

43.	Fauziah Nurunnajmi, S.E.	Analisis Hubungan Antar Lembaga Sub Kelompok Hubungan Antar Lembaga Kelompok Persidangan dan Humas Biro PSP	Anggota
44.	Galih Pamungkas Sabriarso, A.Md.	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi Sub Kelompok TI Kelompok Sisfo Biro PSP	Anggota
45.	Natalina Pakpahan, S.I.Kom.	Analisis Publikasi Sub Kelompok Hubungan Media dan Publikasi Kelompok Persidangan dan Humas Biro PSP	Anggota



DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
SEKRETARIS JENDERAL,

HARIO SUSMORO